

BAB III

AKAR MUNCULNYA KONFLIK ROHINGYA & BENTUK KEBIJAKAN TURKI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA

Munculnya konflik kemanusiaan etnis Rohingya berasal dari sejarah yang panjang. Konflik ini sudah terjadi sangat lama, dan semakin memuncak di era sekarang. Semakin disorotnya konflik kemanusiaan etnis Rohingya ini membuat dunia internasional semakin tanggap dalam memberikan responnya. Serta Turki di era Erdogan semakin aktif terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya.

A. Konflik Kemanusiaan Etnis Rohingya

1. Sejarah Konflik Etnis Rohingya

Kemunculan pemukiman Muslim di wilayah Arakan pada tahun 1430-1434 pada zaman Raja Naramekhla dianggap sebagai cikal bakal munculnya Etnis Rohingya di Myanmar. Pada awalnya, Raja Naramekhla berkuasa di Mrauk U, yang berada di wilayah Rakhine. Kemudian sempat diusir ke wilayah Bengal sebelum kembali lagi ke wilayah Rakhine. Etnis Rohingya menyebut diri mereka “Rooinga”. Ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata “*rahma*” (rahmat) dalam bahasa Arab atau “*rogha*” (perdamaian) dalam bahasa Pashtun. Populasi penduduk Muslim di Wilayah Arakan semakin hari terus bertambah, bahkan pada saat Inggris menguasai wilayah Arakan atau Rakhine ini, Inggris memasukkan orang-orang dari Bengali yang mayoritas beragama Muslim ke Wilayah Rakhine sebagai Petani. Bahkan ketika Inggris melakukan sensus penduduk Muslim di Wilayah Arakan pada tahun 1911, fakta menunjukkan bahwa penduduk Muslim di wilayah Arakan mencapai 58 ribu jiwa. Sebuah angka yang menunjukkan bahwa sudah sangat banyak jumlah penduduk Muslim di Wilayah tersebut. Sejak saat itulah penduduk Bengali yang merasa senang dengan adanya penduduk Islam di

wilayah Arakan kemudian memilih untuk berpindah ke Arakan. Dari sinilah mulai timbul beberapa gesekan karena mayoritas penduduk yang tinggal di Wilayah Arakan menganut Agama Buddha. (Hartanti, 2013)

PBB sendiri memiliki catatan yang menyatakan bahwa Rohingya adalah hanya penduduk yang menganut agama Islam yang bertempat tinggal di wilayah Arakan, Rakhine, Myanmar. Sedangkan untuk bahasa yang digunakan Rohingya sendiri termasuk dalam bahasa Chittagonia dimana bahasa ini pada umumnya dijumpai di kawasan Bangladesh daerah Tenggara. Bahasa yang digunakan oleh etnis Rohingya ini berbeda dengan bahasa yang digunakan mayoritas penduduk yang berada di Myanmar. Penduduk asli Myanmar sendiri memakai bahasa yang masuk dalam rumpun Austrosiatik, dan Sino-Tibetan. Perbedaan bahasa ini jelas menunjukkan bahwa etnis Rohingya memiliki keturunan dengan penduduk Bangladesh di bagian tenggara yang juga memakai bahasa yang masuk dalam rumpun Chittagonia. (Hartanti, 2013) Dari postur tubuh dan bahasa, mereka cenderung memiliki kesamaan tampilan fisik dan kebahasaan dengan bangsa Bangladesh. (Thontowi, 2013)

Etnis Muslim Rohingya merupakan satu dari total 135 etnis minoritas yang ada di Burma-Myanmar. Pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui Etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, hal ini disebabkan karena etnis Rohingya tidak merupakan kelompok etnis yang ada sebelum Myanmar merdeka pada tahun 1948. Kepercayaan yang menganggap bahwa etnis Rohingya bukan termasuk *Burmese* (Warga Burma-Myanmar) tetapi berasal dari Bengali atau Bangladesh juga menjadi penyebab mengapa pemerintahan Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai Warga Negara Myanmar. (Mitzy, 2014) Ada juga kebijakan burmanisasi oleh pemerintah Myanmar, dimana kebijakan ini ialah hanya mengakui adanya satu agama di Myanmar yaitu agama Budha. Sehingga etnis Rohingya yang memeluk agama Islam tidak diakui keberadaannya. Mengenai kapan awal

masuknya etnis Rohingya ke Myanmar sendiri masih diperdebatkan oleh beberapa ahli, ada yang mengatakan bahwa etnis Rohingya muncul pada tahun 1950-an, ada juga yang mengatakan sejak 1920-an. Bahkan etnis rohingya ini dianggap sebagai imigran gelap oleh pemerintah Myanmar yang mengatakan bahwa Rohingya adalah pelintas batas dari Bangladesh. Etnis Rohingya yang memiliki perbedaan agama dengan mayoritas etnis ataupun warga di Myanmar juga tidak mengimplementasikan budaya seperti mayoritas warga Myanmar pada umumnya sehingga mereka dianggap sebagai etnis yang berbeda dengan lainnya.



Gambar 2 wilayah yang ditempati etnis Rohingya di Myanmar

2. Penyebab Munculnya Konflik Rohingya

Etnis Rohingya dalam kenyataannya mendapatkan perlakuan yang sangat diskriminatif oleh pemerintahan Myanmar. Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh etnis

Rohingya ini sendiri tak lepas dari anggapan bahwa mereka berbeda dengan kebanyakan etnis di Myanmar sehingga pemerintah pun tidak menganggap mereka sebagai satu kesatuan. Perbedaan bahasa yang mencolok yang digunakan oleh etnis Rohingya menjadi salah satu alasan mengapa mereka mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil oleh pemerintah Myanmar dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Selain penggunaan bahasa yang berbeda oleh etnis Rohingya, pemerintahan Myanmar juga menganggap bahwa warga muslim tidak menjalankan budaya yang ada di Burma (Myanmar) sehingga mereka mendapatkan perilaku yang diskriminatif oleh pemerintahan Myanmar. Selain dua alasan tersebut yang lebih mengarah ke budaya etnis Rohingya yang berbeda, ada anggapan yang mengatakan bahwa alasan pemerintah Myanmar melakukan tindakan diskriminatif ialah untuk mencegah etnis Rohingya yang sudah mengungsi ke negara lain agar tidak kembali lagi ke Myanmar. (Levinson, 1994) Ada beberapa aspek kehidupan yang tidak diterima oleh etnis Rohingya dari pemerintahan Myanmar. Aspek tersebut diantara lain hak untuk hidup dengan layak, hak politik, hak ekonomi, maupun aspek lainnya dalam bernegara. Perlakuan yang diskriminatif dari pemerintahan Myanmar ini dimulai sejak Myanmar meraih kemerdekaan pada tahun 1948. Dimana sejak saat itu, etnis Rohingya selalu ditindas oleh pemerintah Myanmar dan tidak pernah dianggap sebagai warga Myanmar. Pemerintahan Myanmar juga tak pernah menyebutkan etnis Rohingya sejajar dengan 135 etnis lainnya yang ada di Myanmar. Padahal, jejak sejarah jelas-jelas menyebutkan bahwa etnis Rohingya ini sudah ada di Myanmar sejak abad ke-7 masehi jauh sebelum Myanmar meraih kemerdekaan pada tahun 1948. (Kurniawan dalam Mitzy, 2014)

Perlakuan diskriminatif oleh pemerintah Myanmar sudah dirasakan etnis Rohingya sejak tahun 1962. Dimana saat itu Myanmar dipimpin oleh U Nay Win. Dalam memimpin Myanmar kala itu, U Nay Win membuat kebijakan-kebijakan

yang sangat merugikan bagi etnis Rohingya. Dimana U Nay Win melakukan operasi-operasi dengan dibantu oleh militer Myanmar dalam upaya untuk mengusir secara paksa etnis Rohingya dari Myanmar. Kebijakan yang dilakukan oleh U Nay Win ini sangat sistematis sehingga berjalan dengan baik untuk mengusir etnis Rohingya. Beberapa kebijakannya ialah : *Extra Judicial Killing*, penangkapan warga etnis Rohingya secara sewenang-wenang, penyitaan properti yang dimiliki oleh etnis Rohingya, propaganda anti-rohingya, dan beberapa kebijakan lainnya.

Terjadinya pertikaian maupun konflik antara etnis Rohingya dengan warga Buddha lokal di Myanmar berlanjut pada tahun 1972. Dimana kala itu terjadi kerusuhan yang merebutkan aspek kebutuhan ekonomi serta kebutuhan hidup. Pemerintah Myanmar yang harusnya menjadi penengah dalam kerusuhan ini justru membuat kebijakan yang lebih menguntungkan bagi warga Buddha. Serta pemerintah Myanmar pun terkesan lebih melindungi etnis warga Buddha dibandingkan etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar kemudian melakukan perampasan hak atas tanah, larangan melaksanakan ibadah bagi etnis Rohingya, dan adanya pengusiran terhadap etnis Rohingya. Dalam melakukan beberapa tindakan yang kurang bijak ini, pemerintah Myanmar dibantu oleh militer Myanmar dalam praktiknya di lapangan sehingga etnis Rohingya pun sulit untuk melakukan pembelaan. (Alunaza & Toy, 2017)

Pada saat Rezim Ne Win berkuasa di Myanmar sejak tahun 1978, dilakukanlah sebuah operasi militer yang ditujukan kepada etnis Rohingya guna menyingkirkan etnis Rohingya dari Myanmar. Hal ini dilakukan oleh Rezim Ne Win karena mereka menganggap bahwa etnis Rohingya ialah sebuah ancaman bagi eksistensi kekuasaan mereka. Setelah dilakukan operasi militer ini, hal yang diinginkan oleh rezim Ne Win ini benar terjadi. Banyak warga rohingya yang kemudian hijrah ke Bangladesh untuk mencari perlindungan

disana. Rezim Ne Win sendiri berkuasa hingga tahun 2000, dimana sepanjang kekuasaan mereka, etnis Rohingya selalu mengalami tekanan yang berat serta tindakan diskriminatif yang luar biasa. Beberapa upaya era resim Ne Win atau biasa disebut junta militer adalah dengan cara mempengaruhi etnis Rohingya agar mau untuk berpindah keyakinan dari Islam menjadi Budha. (Siba & Qomari'ah, 2018)

Hal lainnya yang tak kalah diskriminatif ialah ketika tahun 1982 dimana kala itu Myanmar masih disebut sebagai Burma, yang pada saat itu sangat kental dengan nuansa militer membuat sebuah kebijakan yaitu *Burma Citizenship Law*. Dimana dalam hukum kependudukan ini, etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar atau tidak diberi kewarganegaraan oleh Myanmar. Sehingga mereka pun secara hukum tidak dilindungi oleh pemerintahan Myanmar kala itu dan justru malah ditindas dengan sangat tidak adil. (Mitzy, 2014)

Ancaman kekerasan juga sangat sering diterima oleh etnis Rohingya, dimana ancaman kekerasan yang ditujukan kepada etnis Rohingya ini justru berasal dari pemerintahan Myanmar sendiri yang cenderung sangat agresif terhadap etnis Rohingya. (Pramono, 2010) Lagi-lagi, hal ini didasari oleh pemikiran bahwa etnis Rohingya ini bukan merupakan warga negara Myanmar. Secara mendetail, berikut adalah rincian beberapa tindakan diskriminatif yang ditujukan kepada etnis Rohingya :

1. Penolakan Pemberian Kewarganegaraan
2. Pembatasan untuk berpindah tempat
3. Pembatasan dalam kegiatan ekonomi
4. Pembatasan dalam bidang pendidikan
5. Pembunuhan, penahanan, dan penyiksaan
6. Pelecehan terhadap kaum wanita dan pembatasan pernikahan
7. Kerusuhan Anti Muslim Rohingya yang sering terjadi

Pembatasan untuk berpindah tempat dirasakan oleh etnis Rohingya ialah mereka hanya boleh menempati dimana awal mereka bermukim di Myanmar, tidak bisa dengan bebas berpindah ke daerah-daerah lain di Myanmar. Bahkan pemerintahan Myanmar cenderung untuk lebih menginginkan mereka berpindah ke negara lain. Mereka bisa berpindah dengan bebas ketika mampu memberikan uang sogokan kepada militer Myanmar maupun pemerintahan Myanmar.

Dalam hal ekonomi, penjelasannya adalah mereka dibatasi dalam mencari pekerjaan bahkan bisa dikatakan mereka dipersulit untuk mencari pekerjaan di Myanmar. Berlaku juga bahwa mereka harus membayar uang sogokan jika ingin lebih leluasa untuk mencari pekerjaan di Myanmar. Sedangkan dalam pembatasan di bidang pendidikan, anak-anak Muslim tidak mendapatkan sebuah fasilitas pendidikan yang layak seperti halnya anak-anak Budha di Myanmar. Mereka benar-benar sangat dibatasi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hal pernikahan, etnis Rohingya pun dibatasi dimana satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki maksimal 2 anak, serta saat anak mereka lahir tidak mendapatkan sertifikat kelahiran. Hal yang jelas sangat berbanding terbalik dengan warga Budha yang berada di Myanmar. (Siba & Qomari'ah, 2018)

Dalam aspek pernikahan, dengan semakin banyaknya wanita Buddha yang menikah dengan Lelaki dari etnis Rohingnya yang beragama Islam pun dilarang di Myanmar. Karena dalam kenyataannya, wanita Buddha yang menikah dengan etnis Rohingnya ini berpindah agama menjadi agama Islam. Pemerintah Myanmar yang merasa terancam dengan adanya fakta ini kemudian membuat kebijakan jika wanita Buddha menikah dengan lelaki Muslim, maka sang lelaki ini akan dipenjarakan. (Susetyo, 2013)

Dalam konteksnya dengan ketidaksukaan mayoritas etnis di Myanmar terhadap Rohingnya, sangat sering terjadi

unjuk massa ataupun pergerakan masyarakat yang ditujukan kepada Rohingya. Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa pemerintahan Myanmar tidak memberi kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya, sehingga memang juga memicu terjadinya banyak demonstrasi yang dilakukan warga Myanmar dalam upaya menyingkirkan etnis Rohingya dari Myanmar.

Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh etnis Rohingya tidak hanya datang dari pemerintahan Myanmar saja, akan tetapi juga dari etnis lain yang berada di wilayah Myanmar. Presiden Thein Sein pun pernah mengemukakan pendapat bahwa satu-satunya cara yang benar dalam mengatasi ataupun mengurangi tindakan diskriminatif terhadap etnis Rohingya ialah dengan mendeportasi etnis Rohingya ke negara lain. Akan tetapi solusi tersebut pun tidak di implementasikan secara jelas oleh pemerintah Myanmar sehingga tetap tidak ada negara yang memberikan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya.

Setelah mengalami tindakan diskriminatif yang dilakukan baik itu oleh pemerintahan Myanmar maupun etnis mayoritas yang ada di Myanmar, puncak dimulainya konflik genosida di Myanmar ialah tahun 2012. Tepatnya pada bulan Juli 2012, dimana konflik ini terjadi antara etnis Rohingya yang merupakan etnis minoritas di Myanmar dengan warga Rakhine yang merupakan etnis mayoritas di Myanmar. Secara umum, tindakan kekerasan dipicu oleh pemerkosaan dan pembunuhan terhadap warga Budha yang diduga dilakukan oleh kaum Muslim dari etnis Rohingya. Setelah mendengar kabar tersebut, warga Budha kemudian melakukan balasan yaitu berupa pembunuhan terhadap 10 warga Muslim. Mulai dari kejadian tersebut, kemudian banyak sekali konflik-konflik yang terjadi terus menerus antara etnis Rohingya dengan warga Myanmar yang tinggal di daerah Rakhine. (Siba & Qomari'ah, 2018)

Sejak tahun 2012 pula, di Myanmar mulai menyebar juga Islamophobia. Menyebarnya pemahaman Islamophobia ini pun didasari beberapa penyebab. Yang pertama, ialah pembebasan pendeta Buddha radikal di Myanmar yaitu Ashin Wirathu yang kemudian pendeta ini membentuk sebuah kelompok yang diberi nama 969 untuk menyebarkan sentimen terhadap agama Islam. Gerakan 969 ini awalnya didirikan untuk menyerang balik etnis Rohingya yang membuat kedai-kedai di wilayah strategis di Rakhine dengan menggunakan simbol 786 (*basmallah*). Kedai ini kemudian dihancurkan oleh kelompok Gerakan 969 (Susetyo, 2013). Tindakan lain yang juga dilakukan Gerakan 969 ini yaitu memberikan propaganda kepada warga Buddha bahwa etnis Rohingya yang beragama Islam yang merupakan 4% dari keseluruhan populasi Warga Myanmar akan menjadi ancaman besar. Dimna kelompok ini menganggap bahwa etnis Rohingya akan menjadi etnis penguasa di Myanmar dan kemudian menyebarkan ajaran Islam ke seluruh warga Myanmar. Pendapat yang dikemukakan kelompok 969 ini sebenarnya cukup beralasan karena populasi etnis Rohingya di Rakhine ini berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Yang kedua ialah penghapusan sensor media di Myanmar. Kebijakan ini membuka peluang yang sangat lebar untuk terjadinya propaganda terhadap etnis Rohingya melalui media sosial, media televisi, bahkan media cetak sekalipun. Karena dengan adanya kebijakan ini akan membuat kebebasan untuk menyampaikan sebuah berita ataupun informasi yang bisa juga merupakan informasi bohong atau disebut *hoax*. Sebagai contoh penyalahgunaan media sosial di Myanmar yaitu kala terjadinya kerusuhan antara etnis Rohingya dengan warga Buddha hanya karena penyebaran berita bohong di media sosial yang menyebutkan bahwa ada pelecehan gadis beragama Buddha yang dilecehkan oleh bosnya yang beragama Islam. (CNN, 2014)

Setelah mencuatnya berita bahwa ada seorang gadis Buddha yang mengalami pelecehan oleh beberapa lelaki etnis Rohingya, warga Buddha pun melakukan balasan terhadap

etnis Rohingya. Dimana balasan yang dilakukan oleh warga lokal yang beragama Buddha ini ialah dengan pembakaran bus di wilayah Rakhine. Dari peristiwa ini diketahui bahwa ada 10 orang warga yang berasal dari etnis Rohingya meninggal dunia. Dengan adanya saling balas ini juga merupakan semakin memanasnya konflik yang terjadi antara kedua etnis ini. (Waluyo, 2013)

Penyebab lainnya yang tak kalah vital dalam mempengaruhi terus memanasnya konflik antara kedua etnis ini ialah sikap dari militer Myanmar. Militer di Myanmar seperti sangat tidak melindungi etnis Rohingya dan malah cenderung ingin menyiksa etnis Rohingnya secara terus menerus. Militer memiliki peran sangat besar ketika Myanmar melakukan pengusiran wtnis Rohingnya. Mereka terus menerus melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingnya sehingga etnis Rohingnya pun tak mampu melawan dikarenakan militer di Myanmar dilengkapi dengan persenjataan yang cukup lengkap. Adanya serangan dari pemberontak yaitu ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) yang ditujukan kepada pos keamanan dan militer Myanmar yang kemudian menwaskan 12 aparat keamanan Myanmar semakin meningkatkan agresifnya militer Myanmar untuk melakukan kekerasan kepada etnis Tohingya. Dimana setelah kejadian ini, militer Myanmar melakukan blasan serangan yang ditujukan kepada militan ARSA dan juga ditujukan pada etnis Rohingya. (Pujayanti, 2017)

Analisis yang dapat diambil dari adanya penyerangan balasan yang dilakukan oleh Militer Myanmar adalah sebuah tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, hali ini karena harusnya militer adalah menjaga keamanan dan kedaulatan sebuah negara. Dengan adanya tindakan ataupun serangan balasan yang dilakukan oleh militer Myanmar ini sangat jelas menunjukkan adanya indikasi bahwa militer di Myanmar tidak netral. Dalam artian, militer Myanmar ingin mengusir etnis Rohingya dan hanya melindungi warga Buddha. Dalam hal ini, pemerintah Myanmar dengan militer

yang merupakan departemen kemanan jelas saling mendukung karena memiliki prinsip yang sejalan. (Alunaza & Toy, 2017)

3. Perlawanan Yang Dilakukan Oleh Etnis Rohingya

Dengan adanya perlakuan diskriminatif yang terus menerus menimpa etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar dan juga warga Buddha Myanmar, sebenarnya etnis Rohingya di beberapa kesempatan juga dapat melakukan respons perlawanan terhadap apa yang mereka terima.

Pemberontakan atau perlawanan yang dilakukan oleh etnis Rohingya mulai banyak dilakukan sejak pasca pemilu tahun 1960 di Myanmar, alasannya adalah ketika pemerintah membuat undang-undang yang menjadikan Burma (Myanmar) menjadi negara Buddha. Etnis Rohingya yang merasa terdiskriminasi tentu saja membuat pergerakan untuk menolak undang-undang yang telah dibuat. Etnis rohingya yang semua warganya beragama Islam melakukan pergerakan yang masif untuk menolak undang-undang tersebut. Bahkan karena sangat serius menolak undang-undang yang telah dibuat ini, sempat ada gencatan senjata yang dilakukan oleh etnis Rohingya yang tentu saja ditujukan kepada pemerintah Myanmar.

Pemberontakan atau perlawanan selanjutnya oleh etnis Rohingya didasari oleh kebijakan pemerintah Myanmar tentang migrasi. Dimana migrasi ini menjadi satu masalah yang paling besar dan mencuat di kawasan etnis Rohingya berada. Pemerintah yang tidak mengakui mereka sebagai warga negara Myanmar, membuat batasan mengungsi bagi etnis Rohingya. Dimana ketika etnis Rohingya mengungsi di Bangladesh, mereka pun tidak bisa mendapatkan perlindungan ataupun hak dibawah negara tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, puluhan ribu etnis Rohingya melakukan migrasi untuk mendapat hak bernegara. Migrasi yang dilakukan antara lain menuju ke Malaysia melalui jalur laut, dengan latar belakang di Malaysia banyak penduduk muslim. Akan tetapi,

setelah mereka sampai di Malaysia status mereka masih ambigu dan tetap tidak mendapatkan hak yang diinginkan. Selain Malaysia, etnis Rohingya juga menuju ke Thailand. Hasil yang didapatkan setelah di Thailand sama seperti di Malaysia. Mereka justru di dikembalikan ke tengah laut dan tak diterima di Thailand. (Mitzy, 2014)

Migrasi yang dilakukan oleh etnis Rohingya terus menerus berlanjut dalam kurun beberpa puluh tahun. Hingga tahun 20017, migrasi yang dilakukan oleh etnis Rohingya seperti memasuki periode ke-2. Sama seperti migrasi sebelumnya, etnis Rohingya tetap menjadikan jalur laut sebagai sarana menuju ke negara yang mereka inginkan. Malaysia, Bangladesh dan Thailand masih menjadi titik utama tujuan migrasi oleh etnis Rohingya. Perlakuan kekerasan, eksploitasi pedagang laut, hingga ditahan di negara yang mereka tuju karena tidak memiliki dokumen yang lengkap pun dialami oleh etnis Rohingya. Hingga akhirnya etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh mebcoba membuat perlawanan dengan melakukan pelatihan militer kepada warga-warganya. Pemerintah Myanmar yang mengetahui adanya pelatihan ini kemudian semakin menganggap etnis Rohingya sebagai sebuah ancaman.

Perlawanan selanjutnya yang dilakukan oleh etnis Rohingya yaitu pada saat Mynamar sudah berada di sistem demokrasi. Perlawanan yang dilakukan oleh etnis Rohingya disini hanya sebatas mereka ingin melindungi identitasnya. Hal ini dikarenakan pada saat sudah menjadi negara yang demokratis, Myanmar dianggap sudah lebih memperhatikan HAM yang cukup kepada etnis Rohingya. Sehingga fokus utama perlawanan etnis Rohingya pada masa ini tidak lagi berfokus kepada migrasi yang harus dilakukan. Upaya yang dilakukan dalam melindungi identitas mereka ialah dengan cara menekan pemerintahan Myanmar agar segera memenuhi hak-hak hidup mereka secara baik dan adil. Serta yang paling penting dan sangat diharapkan oleh etnis Rohingya tentu saja ialah pengakuan kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar

kepada mereka. Meskipun sempat saat ini pun, keinginan etnis Rohingya belum mampu untuk diwujudkan oleh pemerintah Myanmar.

B. Respon Dunia Internasional Terhadap Konflik Rohingya

Respon dunia internasional ataupun perhatian yang diberikan oleh dunia internasional terhadap konflik kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya sudah mulai muncul sejak tahun 2012 ketika konflik di Rohingya semakin meluas dan semakin banyak merenggut korban jiwa. Bahkan bisa dikatakan jika respon ataupun perhatian dunia internasional kepada konflik kemanusiaan etnis rohingya cukup terlambat. Respon dunia internasional ini muncul ketika konflik etnis rohingya semakin diekspos oleh media massa. (Yumitro, 2017)

Respon dunia internasional terhadap konflik etnis rohingya ini lebih tertuju dengan penyediaan tempat pengungsi rohingya. Artinya, negara-negara yang memberikan perhatian kepada etnis Rohingya bersedia untuk menampung pengungsi Rohingya. Salah satu negara yang paling banyak terdampak konflik etnis rohingya ini ialah bangladesh. Bangladesh menjadi negara yang paling dekat yang bisa dituju oleh warga etnis Rohigya untuk mengungsi. Dimana sejak tahun 1978, ada kurang lebih 200.000 pengungsi yang ditampung di Bangladesh. Pengungsi di Bangladesh sendiri ditempatkan di tenda-tenda yang telah disiapkan yang bisa dikatakan tidak layak untuk dijadikan tempat pengungsian. Hal ini dikarenakan Bangladesh sendiri ialah negara yang secara ekonomi bisa dibilang miskin, dan di dalam nmegeri nya sendiri masih banyak sekali masalah yang dihadapi. Bangladesh sendiri seakan-aakan tidak terlalu memperdulikan pengungsi dari Rohingya karena mereka sendiri berfokus untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam negerinya. Bangladesh pun tidak memberikan bantuan bantuan seperti

makanan, pakaian, obat dan lainnya. Bahkan karena keadaan ekonomi negara nya yang miskin, kemudian melalui UNICEF, Bangladesh memutuskan untuk tidak lagi bekerjasama dalam pemerian bantuan makanan, kesehatan, dan pelatihan kesehatan bagi pengungsi dari Rohingya.

Dalam level organisasi internasional sendiri, Organisasi Konferensi Islam (OKI) sudah memberi perhatian kepada konflik etnis Rohingya sejak tahun 2000. Dimana setiap kali OKI mengadakan KTT dan ada pembahasan mengenai konflik kemanusiaan Rohingya ini, maka OKI akan menyuarakan agar pemerintah Myanmar segera memberhentikan konflik tersebut. Dan OKI juga selalu memberi kecaman terhadap pemerintah Myanmar yang terus menindas etnis Rohingya. Akan tetapi, peran OKI hanya sekedar memberi kecaman dan teguran terhadap pemerintah Myanmar dan belum ada tindakan yang secara nyata untuk membantu upaya penyelesaian konflik kemanusiaan Rohingya. (Yumitro, 2017)s

Amerika Serikat juga menjadi salah satu Negara yang sudah memberikan perhatian kepada konflik kemanusiaan di Rohingya. Bahkan, sejak tahun 1991 Amerika Serikat sudah menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada etnis rohingya. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Amerika Serikat sebdiri ditujukan kepada pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. Bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat sendiri disalurkan melalui Palang Merah Internasional. Selain memberikan bantuan kemanusiaan, Amerika Serikat pun melarang Bangladesh untuk membuat kebijakan guna mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar karena terkait dengan keselamatan etnis Rohingya itu sendiri. Selain itu, Amerika Serikat juga membuat program pendidikan yang ditujukan kepada anak-anak yang berada di pengungsian Bangladesh. Sejatinya, dalam memberikan bantuan tadi Amerika Serikat difasilitasi oleh Christian Solidarity Worldwide (Lembaga Solidaritas Kristen Dunia). (Sidhu & Parnini, 2011)

PBB juga menjadi salah satu organisasi Internasional yang sangat gencar untuk menyuarakan dihentikannya konflik kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Akan tetapi, hak veto yang ada di PBB membuat dunia internasional seakan-akan dikuasai oleh beberapa negara besar saja. Hal ini bisa dilihat jika ada perundingan di PBB dan 99% negara menyetujuinya, akan tetapi ada satu saja negara yang memiliki hak veto menolak, maka kebijakan tersebut akan tidak bisa di implementasikan. Seperti halnya pemberian sanksi kepada Myanmar dalam kaitannya dengan konflik rohingya ini, jika ada satu negara pemegang hak veto tidak setuju, maka sanksi tersebut tidak bisa diberikan. Terlebih lagi, negara-negara berkembang juga hanya memberikan sedikit sekali sumbangan dana ke PBB sehingga tidak terlalu bisa mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh PBB. Karena semua negara yang memiliki hak veto adalah negara-negara maju yang secara ekonomi kuat, dan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada PBB. Sehingga jika mengandalkan PBB untuk menangani kasus konflik kemanusiaan etnis Rohingya, akan sulit untuk tercapai. (Robson & Rahman, 2012)

C. Bentuk Kebijakan Turki dalam Upaya Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya

Pasca konflik antara etnis Rohingya dengan warga Buddha dari kawasan Rakhine terjadi pada tahun 2012, Turki sebagai negara cukup kuat dan mayoritas penduduknya beragama Islam membuat kebijakan untuk membantu etnis Rohingya di Myanmar. Bantuan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh Turki ialah dengan memberikan bantuan kemanusiaan serta dengan menjalin kerjasama dengan organisasi internasional guna mengupayakan selesainya konflik etnis di Rohingya.

1. Bantuan Kemanusiaan

Upaya Turki dalam upaya penyelesaian konflik rohingya salah satunya dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada etnis rohingya yang ada di pengungsian.

Dalam penyaluran bantuan kepada etnis Rohingya, pada awalnya tidak diberikan izin oleh otoritas Myanmar. Akan tetapi setelah berjalannya waktu, pemerintahan Turki mendapat izin guna menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya. Proses Turki mendapat izin pun juga cukup lama, sehingga akhirnya Presiden Turki saat ini memutuskan untuk menelepon pemimpin Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi dan kemudian diberikan izin. Otoritas Myanmar yang mendapatkan izin menyalurkan bantuan ialah Badan Bantuan kemanusiaan Turki (TIKA). Otoritas ini mendapatkan kewenangan untuk menyalurkan langsung bantuan kepada etnis Rohingya yang berada di Rakhine dengan tentunya menjalin komunikasi dahulu terhadap otoritas lokal di Rakhine. (Christiatuti, 2017)

Bantuan yang diberikan pasca konflik tahun 2012 itu ialah berupa dana kemanusiaan. Melalui perdana menteri kala itu Ahmet Davutoglu, Turki memberikan bantuan dana kemanusiaan sebesar 3,4 juta lira atau senilai dengan 16 miliar rupiah. Bantuan dana kemanusiaan tersebut dianggap oleh etnis Rohingya sebagai bantuan luar negeri pertama yang ditujukan kepada etnis Rohingya yang mengungsi lewat jalur laut. Tak hanya bantuan berupa dana kemanusiaan yang cukup besar, pemerintah Turki juga mengirimkan relawan ke kamp pengungsian etnis Rohingya. Dalam kunjungan ke kamp pengungsi tersebut, pemerintah Turki melalui Istri Perdana Menteri yaitu Emine Erdogan memberikan sumbangan makanan kepada 1500 pengungsi.

Setelah itu, Turki juga mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya yaitu 1.000 ton bantuan. Dimana bantuan ini terdiri dari berbagai macam jenis, seperti makanan, pakaian, obat-obatan, yang disalurkan dengan menggunakan pesawat militer Turki. Bantuan kemanusiaan Turki yang ditujukan kepada etnis Rohingya dari tahun ke tahun tetap dikirimkan karena diiringi dengan semakin mudahnya akses yang diberikan oleh pemerintah Myanmar kepada Turki dalam upaya mengirimkan bantuan.

Pada tahun 2015, Turki juga memberikan bantuan yaitu pengiriman kapal militer ke laut lepas Asia Tenggara. Hal ini disebabkan berdearnya kabar bahwa banyak pengungsi Rohingya yang diusir oleh Bangladesh yang kemudian terombang ambing di sekitaran laut lepas di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2015 sendiri dilaporkan bahwa pengungsi Turki terombang ambing hingga memasuki kawasan Thailand, bahkan juga Indonesia. Hal ini membuat Turki menginstruksikan untuk pengiriman kapal perang menuju Asia Tenggara. Selain mengirimkan kapal perang, Turki juga memberikan bantuan dana sebesar USD 1 Juta sebagai bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya. Bantuan dana yang dikirimkan oleh Turki ini disalurkan dengan bantuan dari PBB. (Pratomo, 2015)

2. Kerjasama dengan PBB serta OKI

Selain membuat kebijakan dengan bentuk mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya di Myanmar, Turki juga terus menyuarakan pentingnya mengakhiri konflik etnis Rohingya di forum internasional melalui PBB dan juga OKI.

Di dalam forum PBB, Erdogan pada tahun 2017 mencanangkan akan menyerukan topik mengenai kekerasan yang diterima oleh etnis Rohingya akan dibahas dalam pertemuan majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Erdogan juga menyebutkan bahwa ia akan terus memberikan tekanan kepada PBB untuk lebih peduli terhadap konflik etnis di Rohingya dan menyarankan agar PBB terus mendesak pemerintahan Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Sumber-Sumber Politik di Turki pun memberikan pernyataan bahwa Erdogan telah melakukan pembicaraan via telepon dengan Guterres yang merupakan salah satu orang penting di PBB mengenai situasi yang sedang terjadi di Myanmar. Turki pun juga telah menjalin hubungan dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam tindak lanjut mengenai konflik etnis Rohingya. (Nursya'bani, 2017)

Menteri Luar Negeri Turki Mevut Cavusoglu sendiri juga mendapatkan respon positif dari PBB usai menyuarakan pentingnya negara-negara lain untuk bersatu demi membantu penyelesaian konflik kemanusiaan Rohingya. Mevut Cavusoglu juga memberikan tekanan kepada Bangladesh agar membuka perbatasannya dengan Rakhine agar bisa menampung pemngungsi Rohingya. Sehingga pengungsi Rohingya mendapat jaminan keamanan di Bangladesh. Menteri Luar Negeri Turki ini juga menjamin Turki akan memberikan bantuan dana kepada bangladesh jika mau membuka perbatasannya untuk penampungan pengungsi Rohingya. Hal ini kemudian direspon oleh PBB melalui Juru Bicara Badan Pengungsi PBB (UNHCR) yaitu Aslam Khan. Aslam Khan menyebutkan bahwa inisiatif yang dilakukan oleh Turki ialah sebuah inisiatif yang positif dan dapat memberi semangat untuk negara-negara lain agar segera turun tangan untuk menangani konflik kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. (Politik, Mata Mata, 2017)

Kerjasama Turki dengan OKI juga terjalin dalam upaya penyelesaian konflik kemanusiaan yang terjadi di Rohingya. Kerjasama yang dilakukan ialah ketika digelarnya KTT OKI di Istanbul, Turki kemudian menyampaikan gagasan atau pemikiran bahwa seluruh negara-negara islam harus bersatu untuk mengupayakan penyelesaian konflik kemanusiaan yang terjadi di Rohingya. Dalam KTT OKI di Istanbul, Turki selaku Ketua OKI juga mengharapkan bahwa Bangladesh yang merupakan negara terdekat secara geografis dengan terjadinya konflik Rohingya untuk menemukan jalan keluar terkait penyelesaian konflik rohingya.

Setelah munculnya desakan yang diberikan oleh Turki di dalam forum OKI, kemudian muncul kebijakan yang dikeluarkan oleh OKI. OKI menunjuk satu orang untuk menjadi utusan khusus di Myanmar. Syeh Hamid Albar, menjadi utusan OKI untuk Myanmar. Melalui utusan khusus ini, OKI lagi-lagi menyuarakan bagaimana pentingnya konflik etnis Rohingya untuk segera diselesaikan. Pada tahun 2017,

OKI melalui utusan khusus Myanmar ini mengatakan bahwa OKI tidak ingin lagi melihat konflik ini berlarut larut. Syeh Hamid Albar pun mempertanyakan mengapa masyarakat Internasional seperti diam saja melihat konflik Rohingya ini. (BBC, 2017)

Sebelumnya, pada tahun 2013 Turki dengan enam negara anggota OKI lainnya melakukan kunjungan ke Myanmar. Kunjungan yang dilakukan tersebut ialah untuk menunjukkan komitmen yang dimiliki oleh OKI beserta anggotanya untuk menyelesaikan masalah konflik etnis Rohingya di Myanmar. Para anggota OKI, yang juga didalamnya ada Turki kemudian bertemu dengan presiden Myanmar untuk membahas mengenai permasalahan konflik etnis Rohingya. (Muhaimin, RI & 6 negara OKI bantu atasi konflik di Myanmar, 2013)

Kerjasama yang dilakukan Turki dengan OKI lebih tepatnya adalah melalui pertemuan-pertemuan. Dimana Turki selalu aktif untuk memobilisasi OKI didalam pertemuan untuk konsen membahas tentang konflik Rohingya. Sehingga Turki sebagai salah satu negara yang pengaruhnya besar di OKI, terus menyuarakan ke anggota OKI lainnya mengenai pentingnya persatuan untuk membantu saudara muslim di Rohingya. Sehingga OKI sebenarnya adalah jembatan Turki untuk bisa memperkuat bantuan ataupun upaya yang dilakukan oleh Turki dalam upaya penyelesaian konflik rohingya tersebut. Menteri Luar Negeri pun seperti menyindir anggota OKI lainnya, ia mengatakan bahwa hanya Turki yang peduli dengan konflik Rohingya. Dengan menyuarakan suara lewat OKI, hal ini tentu saja akan membuat semakin banyak negara, khususnya negara Islam anggota Oki yang semakin fokus membantu konflik Rohingya. (SimponiNews, 2017)

